

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama, ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia dibandingkan dengan radio, televisi dan internet¹. Kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, dan bukan merupakan unsur yang asing yang terpisah dari masyarakat pers. Sebagai lembaga masyarakat ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Pers menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat. Sebagai medium komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam suatu keserasian sosial. Dalam hal ini sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur sosial politik yang berlaku.

Penulisan ini membahas tentang pers yang dicetak, seperti surat kabar dan majalah yang terlibat dalam konflik antara kelompok komunis (PKI) dan anti

¹ F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: Gramedia, 1990) hlm. 10.

komunis di Surabaya pada tahun 1960-1965, dimana pers tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu khususnya PKI yang ingin menguasai kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan pusat (kepemimpinan Soekarno). Surat kabar-surat kabar tersebut memberikan tulisan-tulisan yang sifatnya menghasut masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh partai tersebut, menggunakan surat kabar untuk mendukung atau menolak pendapat dari tokoh yang bersangkutan, menggunakan surat kabar untuk memfitnah musuh-musuhnya dan sebagainya, misalnya ketua comite central PKI DN Aidit menuduh Sayuti Melik melalui koran-koran PKI sebagai seseorang yang ingin membunuh ajaran Sukarno dan Sukarno sendiri karena dianggap menyebarkan ajaran yang berkedok Soekarnoisme². Usaha tersebut ternyata mendapat hambatan yang besar dari kalangan pers itu sendiri di satu pihak dan masyarakat di pihak lain yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab III.

Pada tahun 1960, DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dibubarkan dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 dan dibentuknya DPR-GR (DPR Gotong Royong) oleh Presiden Soekarno, semakin menjadikan PKI sebagai kekuatan politik yang dominan di Indonesia dan membuat partai tersebut semakin dekat dengan kekuasaan. Hal ini membuat partai yang lain yang dulunya memperoleh kursi di DPR menjadi semakin berkurang dari jumlah yang seharusnya dan tentunya hal itu merugikan bagi partai tersebut. PKI mendapat kedudukan yang melebihi dari kursi

² Tribuana Said, *Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap Gerakan PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983) hlm. 63.

DPR yang seharusnya dia dapatkan ketika berada dalam DPR lama (DPR hasil Pemilu 1955)³.

Dan pada masa-masa selanjutnya, PKI mengadakan kegiatan yang lebih ofensif untuk mendekatkan dirinya kepada puncak kekuasaan. Berbagai cara dilakukannya seperti dengan menguasai organisasi massa yang banyak pendukungnya, misalnya BTI (Barisan Tani Indonesia), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Angkatan bersenjata dan bidang-bidang lain yang sangat berpengaruh bagi jalannya perkembangan negara Indonesia termasuk juga pers (media cetak). Keadaan tersebut menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, baik yang pro PKI maupun yang kontra terhadap perjuangannya. Keadaan tersebut berlaku secara umum di Indonesia termasuk di Surabaya.

Pada tahun 1960 sampai tahun 1965 Pemerintah sangat mendukung PKI karena menganggap PKI sebagai partai revolusioner yang mempunyai pikiran maju, namun PKI berusaha untuk merongrong kekuasaan pemerintah dengan jalan menyebarkan fitnah ke berbagai kalangan masyarakat dan mencapai puncaknya pada peristiwa 30 September 1965.

Perkembangan pers tahun 1960-1965 di Surabaya terdiri dari tiga golongan. Golongan pertama yaitu yang menentang PKI, golongan kedua netral dan golongan ketiga mendukung PKI. Dua golongan pers tersebut, yaitu yang pro-PKI dan yang

³ Marwati Djoened Poespo negoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II* Jakarta: Balai Pustaka, 1992) hlm. 312.

kontra PKI berusaha untuk saling menjatuhkan satu dengan lainnya, sehingga konflik diantara sesama media cetak tidak terelakkan lagi dan itu terlihat dari tulisan-tulisan yang diterbitkan di surat kabar tersebut. Sedangkan golongan yang netral lebih condong terhadap yang kontra PKI, hal itu dikarenakan PKI terlalu bersifat ofensif (menekan) dan menyinggung pers yang lainnya, ingin menguasai semua bidang kehidupan di masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa masalah tentang pers pada saat berkuasanya PKI dari tahun 1960-1965 di Surabaya.

1. Bagaimanakah sikap pemerintah terhadap Pers yang ada pada tahun 1960-1965?
2. Bagaimana perkembangan Pers di Surabaya tahun 1960-1965?
3. Bagaimanakah sikap politik Pers yang mendukung dan menentang PKI?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan pers di Surabaya tahun 1960-1965 khususnya dalam politik.
2. Mengetahui sikap pers yang pro dan yang kontra terhadap PKI.

3. Mengetahui sikap Pemerintah terhadap pers pada tahun 1960-1965.

Dengan penulisan ini kiranya dapat berguna bagi para peneliti atau penulis lain yang ingin menulis tentang pers di Indonesia khususnya di Surabaya pada tahun 1960 sampai tahun 1965 sehingga dapat menambah sumber pustaka. Yang kedua, dapat menjadi bacaan kita mengenai pengetahuan tentang sejarah jurnalisme di Indonesia khususnya di Surabaya. Ketiga, dapat memperkaya pengetahuan kita dibidang pers. Keempat, memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu pengetahuan karena dapat menambah satu koleksi lagi penulisan sejarah pers di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi ini menggunakan sumber berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat di atas. Menurut Marwati Djoenod Poesponegoro, PKI dalam usahanya untuk menguasai negara menggunakan berbagai macam cara yang terencana dengan baik, melalui penguasaan berbagai bidang pokok yang ada dalam masyarakat diantaranya melalui militer, kebudayaan (Lekra), organisasi massa (BTI), kaum buruh (SOBSI), dan juga melalui bidang komunikasi massa (menyusup ke PWI). Hal itu menyebabkan semakin solidnya kedudukan PKI dalam masyarakat, terutama melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan di surat kabar milik PKI⁴.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Hal ini dipertegas oleh Tribuana Said dan D.S. Moeljanto, yang menjelaskan tentang Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) sebagai organisasi pers di Indonesia yang kontra terhadap PKI melakukan perjuangan melawan tindakan PKI dengan menggunakan tulisan-tulisan melalui pers yang intinya menentang PKI. Akhirnya badan tersebut dilarang berdiri di Indonesia karena usaha PKI dalam menghasut Presiden Soekarno dengan menuduh BPS sebagai badan yang ingin melenyapkan ajaran Bung Karno dan mendapat bantuan dari CIA, suatu badan rahasia milik Amerika Serikat⁵.

Dalam sebuah skripsi yang disusun oleh Nila Suryani menjelaskan tentang perkembangan pers yang ada di Makasar. Menggunakan analisis yang kritis tentang bagaimana perkembangan pers di makasar sebelum dan sesudah Proklamasi. Dan pada akhir tulisannya dia memberikan sebuah contoh penerbitan surat kabar yang terbit pertama kali di Makasar⁶.

Tentang penerbitan pers yang ada di Surabaya dijelaskan oleh Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim. Mereka memaparkan tentang perkembangan pers yang ada di Jawa Timur khususnya Surabaya mulai dari jaman penjajahan Belanda sampai dengan jaman awal orde baru, dimana diutarakan tentang perkembangan pers yang ada pada waktu itu⁷.

⁵ Tribuana Said, *op.cit.*

⁶ Nila Suryani Anwar, *Sejarah Perkembangan Pers di Makasar*, sebuah skripsi dari mahasiswa Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Hassanudin.

⁷ Serikat Penerbit Surat kabar Jatim, *Pers Jatim Dari Masa ke Masa*, (Surabaya: SPS Jatim, 1994)

E. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori

Sebelum lebih jauh membicarakan tentang pers, kita harus mengetahui dulu apakah pers itu. Istilah pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain⁸. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers⁹.

Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech* (kebebasan berbicara), sedangkan dalam pengertian sempit merupakan manifestasi dari *freedom*

⁸ F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: Gramedia, 1990) hlm. 9.

⁹ Jurnalistik berasal dari bahasa Prancis, *journal*. Artinya: catatan harian, yaitu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukann denngan cara menyiarkan berita atau ulasannya mengenai berbagai peristiwa sehari-hhari yang bersifat umum dan hangat dalam waktu secepat-cepatnya. Ringkasnya, kegiatan pencatatan atau pelaporan dan penyebaran berita tentang kejadian sehari-hari. Juga berarti bidang profesi yang berusaha menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara periodik dengan menggunakan sarana-sarana media massa yang ada. Pada tahun 1950-an, spesialisasi di bidang jurnalistik dikelompokkan menurut: 1. Sarana atau media, yaitu media cetak: jurnalistik harian, majalah dan kantor berita; media elektronik: jurnalistik radio, televisi dan film; 2. Bidang kerja, yaitu dalam negeri, luar negeri, parlemen, ekonomi, keuangan, olahraga, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Orang yang menjalankan profesinya disebut jurnalis.

of the press (kebebasan media cetak) yang keduanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression* (kebebasan berkarya)¹⁰.

Pers memiliki peran dan fungsi yang penting dalam masyarakat di suatu negara, adapun peranannya yaitu: pertama, menunjuk pada peran yang membangun, untuk memberi informasi, mendidik, dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Pers atau surat kabar dapat berperan dalam menyampaikan kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat. Disamping itu masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik atau kontrol sosial. Pers berperan sebagai salah satu penghubung yang kreatif antara pemerintah dan masyarakat¹¹.

Ketiga adalah pembentukan pendapat umum. Bahkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat dan dalam menegakkan disiplin nasional. Keempat sebagai agen perubahan, dengan membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pers dapat memperluas cakrawala pandangan. Melalui surat kabar orang dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

2. Pers dapat memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulisnya. Dalam masyarakat modern, gambaran kita tentang lingkungan yang jauh diperoleh dari pers dan media massa lainnya. Masyarakat mulai menggantungkan pengetahuan pada pers dan media massa.
3. Pers mampu menumbuhkan aspirasi. Dengan penguasaan media, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media tersebut.
4. Pers mampu menciptakan suasana membangun. Melalui pers dan media massa dapat disebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pers dapat memperluas cakrawala pemikiran serta membangun simpati, memusatkan perhatian pada tujuan pembangunan sehingga tercipta suatu suasana pembangunan yang serasi dan efektif¹².

Disamping itu pers juga memiliki fungsi-fungsi didalam masyarakat, yaitu:

1. Fungsi mendidik.

Dengan adanya pemberitaan yang luas dalam surat kabar, maka masyarakat yang membacanya dapat menambah pengetahuannya tentang berbagai macam pengetahuan yang ada di dunia.

2. Fungsi menghubungkan.

¹² *Ibid.*, hlm. 19.

Surat kabar menyelenggarakan suatu hubungan sosial antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

3. Fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat umum.

Surat kabar tidak hanya menyajikan berita atau informasi tetapi juga memuat pikiran-pikiran, pandangan atau pendapat orang. Surat kabar mengajak pembacanya berpikir sesuai dengan pola yang diinginkannya.

4. Fungsi kontrol sosial.

Kekuatan utama media massa sebagai alat kontrol sosial terletak pada fungsinya sebagai pengawas lingkungan. Pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers sebagian besar ditujukan kepada pemerintah dan aparatnya¹³.

Teori komunis menyebutkan bahwa media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan sebagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Tunduknya media massa pada partai komunis membawa arti yang dalam, yaitu sebagai alat dari partai komunis yang berkuasa. Pers komunis di Indonesia seperti harian *Djawa Timoer*, *Terompet Masyarakat* dan yang lainnya digunakan PKI untuk menyebarkan ajarannya ke masyarakat agar masyarakat mengikuti ajaran tersebut. Kritik diijinkan dalam media massa, tetapi kritik terhadap dasar ideologi dilarang. Media massa melakukan apa yang terbaik bagi negara dan partai, dan apa yang terbaik menurut

¹³ *Ibid.*, hlm. 21.

pimpinan elit negara dan partai. Yang dilakukan media massa untuk mendukung komunis dan sosialis merupakan perbuatan moral, sedangkan perbuatan yang membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis adalah perbuatan immoral¹⁴.

Media yang digunakan untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi adalah juga senjata politik, yang mampu dipakai oleh negara, oleh organisasi-organisasi kapitalistik, atau oleh partai dan gerakan rakyat. Artinya kekuatannya terikat kepada kekuasaan, uang atau jumlah akan tetapi mereka juga mempunyai kekuatan sendiri. Pentingnya informasi sebagai senjata politik selalu diakui. Kedatangan pers dalam dunia ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyebaran demokrasi, sebuah fenomena yang mengesankan setiap orang. Kini pers yang berbicara (siaran radio) dan pers visual (televisi dan mingguan bergambar) mempunyai pengaruh yang sama besarnya seperti surat kabar dan pers tulis. Adalah biasa sekarang untuk menyebut alat yang bermacam-macam ini untuk menyebarkan berita dan ide yang menjadi hasil teknologi modern dengan nama media informasi massa¹⁵.

Rezim otoritarian menyebutkan bahwa media informasi biasanya berada dalam kontrol negara, yang berfungsi untuk menyebarkan propaganda negara, serta sebagai sumber kekuasaan negara yang utama, bersama dengan polisi dan militer. Propaganda ini cenderung untuk mengamankan dukungan penuh dari pemerintah.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁵ Maurice Duverger, penerjemah: Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 268.

Pers bukanlah organisasi perjuangan politik, atau sekurang-kurangnya itulah *klaim* yang dibuat oleh negara (dalam kenyataannya, negara pada umumnya ditangan satu kelas atau kelompok sosial yang lain, dan dia memakai propaganda untuk menghancurkan pengaruh yang lain). Pers merupakan alat integrasi sosial¹⁶.

Rezim demokratis, dipihak lain menyebutkan tidak semua media informasi dikontrol oleh negara. Pluralisme media adalah unsur di dalam pluralisme rezim bersama dengan pluralisme partai politik. Pluralisme dalam partai politik akan menjadi ilusi dan hanya formalistis bilamana tidak disertai oleh pluralisme didalam media informasi, namun jarang kita mendapatkan negara demokratis dimana negara tidak menguasai satupun media informasi. Hampir dimana-mana, penyiaran radio diorganisir oleh dinas negara, sekurang-kurangnya sebagian¹⁷.

Jadi menurut teori yang diungkapkan oleh Maurie Duverger bahwa suatu keadaan politik di dalam masyarakat akan menyebabkan antagonisme (konflik-konflik) yang disebabkan oleh individual maupun kolektif yang menggunakan berbagai macam senjata, termasuk juga pers yang pada akhirnya akan menuju suatu keadaan yang harmonis. Penulisan ini mengulas tentang senjata yang dipergunakan yaitu media massa (khusus surat kabar) yang dijadikan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 269.

Hal ini didukung dengan landasan dari Rachmadi tentang fungsi pers komunis, pers ditetapkan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa atau pendidikan, bimbingan massa yang dilancarkan oleh partai. Bimbingan dan pendidikan massa ini dilakukan melalui propaganda dan agitasi (hasutan) yang merupakan salah satu aspek terpenting dari fungsi partai dan kegiatan-kegiatan formal negara. Hal ini terlihat dari gencarnya usaha-usaha PKI yang ingin mempengaruhi massa supaya menjadi simpatisan PKI melalui tulisan-tulisan pers yang intinya membesarkan partai tersebut sebagai partai yang revolusioner.

Tulisan ini menggunakan pendekatan Sosiologi Politik yang diungkapkan oleh Maurice Duverger, adapun penerapannya tentulah juga disesuaikan dengan kondisi yang ada, karena teori yang lebih tepat harus lahir dari kenyataan sejarah atau keadaan masyarakat itu sendiri. *Modifikasi* diperlukan mengingat perbedaan kondisi yang terdapat dalam suatu penelitian yang tidak sama dengan penelitian yang ada dalam teori-teori dan konsep yang sudah ada.

F. Metode Penulisan

Jenis penulisan ini adalah historis diskriptif analitis yang menjelaskan secara rinci dan detail suatu kejadian obyektif tentang keterlibatan pers dalam konflik golongan komunis (PKI) dan anti komunis di Surabaya tahun 1960-1965 tanpa ada maksud-maksud tertentu yang condong dalam suatu pihak tertentu. Diskriptif analitis yang dimaksud di sini adalah penulisan yang cermat terhadap fenomena sosial

tertentu yang disertai dengan analisis kritis, mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa¹⁸.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- Sumber primer, terdiri dari dua macam kategori, antara lain:

- a. Berupa arsip dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan langsung dengan obyek penulisan. Yaitu surat kabar itu sendiri dan peraturan pemerintah. Dalam penulisan ini yang dijadikan contoh untuk mewakili pers yang mendukung PKI adalah *Trompet Masyarakat*. Surat kabar *Trompet Masyarakat* banyak sekali menurunkan berita-berita yang isinya menentang pihak-pihak yang menghalangi PKI untuk mencapai tujuannya. Harian *Trompet Masyarakat* juga satu-satunya surat kabar golongan kiri yang masih terbit beberapa hari setelah surat kabar golongan kiri lainnya berhenti terbit karena telah dihentikan penerbitannya oleh Pemerintah bersamaan dengan dibubarkannya PKI. Sedangkan pers yang dijadikan contoh untuk mewakili golongan yang menentang PKI adalah majalah *Sketsmasa*. Majalah *Sketsmasa* banyak menulis tentang berita yang isinya menyudutkan PKI dan sangat

¹⁸ Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1983) hlm. 4.

mendukung politik Bung Karno, sehingga majalah tersebut disukai masyarakat dan mampu terjual sampai 125.000 eksemplar¹⁹.

- b. Berupa data yang diperoleh melalui wawancara (mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden) kepada orang yang berhubungan langsung dengan obyek penulisan atau orang yang sejamin yang mengetahui tentang hal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku tentang pers yang ada di perpustakaan dan toko-toko buku yang tentunya isinya sudah mengalami banyak interpretasi dari masing-masing penulis.

Lokasi obyek penulisan ini yaitu pada wilayah Surabaya tahun 1960 sampai tahun 1965 tentang pers (media cetak) yang berkembang pada saat itu.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan metode sejarah kritis yang melalui beberapa tahapan:

- a. *Heuristik*

Yaitu pencarian dan pengelompokan sumber. Sumber yang telah didapat dikelompok-kelompokkan menjadi suatu struktur yang jelas untuk dikaji lebih lanjut dalam langkah selanjutnya.

- b. *Kritik Sumber*

¹⁹ Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, *Pers Jatim Dari Masa Ke Masa* (Surabaya: SPS Jatim, 1994) hlm. 109.

Kritik sumber dibagi menjadi dua macam, pertama kritik ekstern yaitu penelusuran mengenai asli tidaknya sumber tersebut. Apakah sumber tersebut ditulis oleh orang yang terpercaya, bukunya asli atau merupakan isu belaka. Pokoknya mengenai autentik tidaknya sumber tersebut. Yang kedua kritik intern, yaitu mengenai isi dari sumber tersebut. Apakah isi sumber tersebut benar-benar asli atau bohong saja.

c. *Interpretasi (analisis)*

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah didapat disertai dengan paduan dengan teori-teori dari tokoh sejarawan yang sudah mempunyai nama. Dan selanjutnya diolah berdasarkan tingkat kemampuan kita dalam menginterpretasi data-data tersebut.

d. *Historiografi (penulisan)*

Hasil yang sudah diperoleh setelah melalui beberapa tahap diatas ditulis dalam suatu penulisan yang menarik dan jelas²⁰.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. *Bab I* berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka dan sumber, kerangka konseptual dan

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bintang budaya, 1999) hlm. 89.

landasan teori, metode penulisan dan sistematika penulisan. *Bab II*, tentang gambaran umum obyek penulisan yang meliputi kondisi sosial politik Surabaya tahun 1960-1965. *Bab III*, tentang pembahasan yang berisi sikap Pemerintah terhadap pers, perkembangan pers di Surabaya, sikap politik pers di Surabaya yang mendukung dan menentang PKI yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pers di Surabaya yang mendukung PKI dan pers di Surabaya yang menentang PKI. *Bab IV* Kesimpulan, lalu daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II

KONDISI SOSIAL POLITIK SURABAYA